

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau disingkat Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan disertai indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD.

Proses penyusunan Renja OPD dibagi atas dua tahap, yaitu tahap perumusan rancangan dan tahap penyajian. Proses penyusunan rancangan Renja OPD mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), hasil pengkajian terhadap kondisi eksisting Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Melalui proses penyusunan secara terintegrasi ini diharapkan akan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, dan semakin terarahnya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Renja OPD dan RKPD merupakan bagian proses awal tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat, disusunlah rancangan KUA dan rancangan PPAS. Rancangan KUA dan rancangan PPAS ini dijadikan dasar untuk penyusunan RKA OPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 6 Seri E.5)
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2019 adalah sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan tahapan pembangunan daerah periode lima tahun (2018 – 2023) yakni memantapkan kemandirian daerah dengan menekankan pada pembangunan sumber daya manusia, lingkungan hidup dan tata ruang, infrastruktur, hukum dan pemerintahan, serta penyelenggaraan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 48 Tahun 2016.

Dengan disusunnya Renja tahun 2019 diharapkan BKPSDM Kota Padang Panjang akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan kewenangan.

1.4 Sistematika

Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu (2017) dan Capaian Renstra OPD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU (TA 2017)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM

Pada tahun 2017, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang mendapatkan alokasi dana belanja langsung sebesar Rp. 18.702.255.823,- yang tersebar ke dalam 6 program dengan 37 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi keuangan untuk belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp.14.393.754.021,- atau 76,96%.

Untuk lebih jelasnya capaian realisasi keuangan dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Program dan Kegiatan	Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2017		
		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.107.120.000	978.115.191	88,35
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000	3.102.500	79,55
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	50.880.000	40.637.176	79,87
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas	254.870.000	197.286.649	77,41
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	108.150.000	106.950.000	98,89
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	95.020.000	83.841.941	88,24
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.000.000	37.988.300	99,97
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.700.000	51.674.425	92,77
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	2.492.100	49,84
9.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	19.200.000	7.981.600	41,57
10.	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	445.000.000	414.761.460	93,20
11.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	31.400.000	31.399.040	100,00
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	15.559.125.323	11.980.362.331	77,00
1.	Pembangunan Gedung Kantor	15.160.360.000	11.653.504.749	76,87
2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	38.850.000	36.109.391	92,95
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000	14.958.000	99,72
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor	32.025.000	5.757.000	17,98
5.	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	309.600.000	270.033.191	87,22
6.	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	3.290.323	0	0,00
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	125.347.100	116.292.250	92,78
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34.500.000	32.605.000	94,51
2.	Penyelenggaraan Diklat Tugas dan Fungsi Bagi PNSD	72.700.000	66.045.400	90,85
3.	Sosialisasi PP 10 th 1983 jo PP 45 th 1990	18.147.100	17.641.850	97,22

IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	840.000	840.000	100,00
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	262.500	262.500	100,00
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	262.500	262.500	100,00
3.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	175.000	175.000	100,00
4.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	140.000	140.000	100,00
V.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.185.233.400	659.947.751	55,68
1.	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	35.800.000	32.600.000	91,06
2.	Seleksi Penerimaan CPNS	232.453.400	17.024.600	7,32
3.	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis	81.950.000	70.416.302	85,93
4.	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	18.700.000	2.683.700	14,35
5.	Pemberian Bantuan Tugas belajar dan Ikatan Dinas	200.410.000	171.965.476	85,81
6.	Penataan / Penyelamatan Dokumen dan Arsip PNS	68.875.000	55.786.500	81,00
7.	Pengembangan PNS Melalui Jabatan Fungsional Tertentu	3.500.000	3.237.500	92,50
8.	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SAPK)	115.000.000	20.859.100	18,14
9.	Proses Penerbitan Karis, Karsu, Taspen, Askes dan Satya Lencana Karya Lencana Karya Satya	45.720.000	45.545.216	99,62
10.	Ujian Kompetensi Jabatan Bagi Pejabat Struktural	198.225.000	120.610.507	60,85
11.	Sistem Penilaian Kinerja ASN Kota Padang Panjang	184.600.000	119.218.850	64,58
VI.	Program Pendidikan Kedinasan	724.590.000	658.196.498	90,84
1.	Pendidikan Perjenjangan Struktural	262.600.000	226.328.191	86,19
2.	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	461.990.000	431.868.307	93,48
	JUMLAH	18.702.255.823	14.393.754.021	76,96

Dari 6 program dan 37 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017, terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan maksimal, yaitu :

1. Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah

Kegiatan pensertifikatan tanah ini tidak dapat direalisasikan karena dalam proses pengurusan sertifikat tanah, pihak BPN meminta sertifikat induk dan surat-surat pendukung yang asli. Pihak BKPSDM telah mencoba menelusuri dan mencari sertifikat dan surat-surat pendukung yang asli ke Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Bidang Aset BPKD, namun tidak ditemukan.

2. Seleksi Penerimaan CPNS

Realisasi keuangan untuk kegiatan ini hanya sebesar 7,32%, hal ini disebabkan karena masih adanya pembatasan penerimaan CPNS di tahun 2017 yang didasarkan pada surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B:/2631/M.PAN-RB/07/2016 tanggal 25 Juli 2016. Sementara persiapan, konsultasi dan koordinasi tentang formasi penerimaan CPNS sudah dilaksanakan ke Kemenpan RB dan BKN sejak awal tahun anggaran.

3. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin

Realisasi keuangan untuk kegiatan ini hanya 14,35%, namun secara fisik kegiatan ini terrealisasi 100%. Rendahnya realisasi anggaran ini disebabkan karena tidak adanya kasus pelanggaran disiplin tahun 2017 yang membutuhkan perjalanan dinas ke luar daerah seperti ke BKN atau ke Kementrian, sehingga anggaran perjalanan dinas luar daerah tidak terrealisasi.

4. Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SAPK)

Realisasi keuangan untuk kegiatan ini hanya 18,14%. Hal ini disebabkan karena gagalnya kegiatan pengadaan aplikasi SIMPEG berbasis Web. Dimana pengadaan ini telah dilakukan pelelangan sebanyak 5 kali di LPSE, namun tidak ada penawaran yang lulus dalam evaluasi sampai pada tahap pembuktian data kualifikasi.

5. Ujian Kompetensi Jabatan Bagi Pejabat Struktural

Realisasi keuangan kegiatan ini hanya Rp. 120.610.507, atau 60,85% dari anggaran yang tersedia. Hal ini disebabkan karena tertundanya kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang. Dimana Pemerintah Kota Padang Panjang baru mendapatkan persetujuan pelaksanaan seleksi JPT Sekretaris Daerah pada akhir tahun 2017 dari Gubernur Sumatera Barat. Sehingga pelaksanaan seleksi JPT Sekretaris Daerah baru dapat dilaksanakan pada tahun 2018.

6. Sistem Penilaian Kinerja ASN

Realisasi keuangan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 119.218.850,- atau sebesar 64,58%. Rendahnya serapan anggaran kegiatan ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan terkait penggunaan aplikasi penilaian kinerja ASN. Dimana pada awalnya Pemerintah Kota Padang Panjang akan mengadopsi aplikasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun setelah dilakukan peninjauan ke Pemprov Jawa Barat, pihak Dinas Kominfo Padang Panjang menyatakan kesanggupan untuk membangun sendiri aplikasi penilaian kinerja tersebut yang langsung terintegrasi dengan aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sehingga terdapat beberapa rekening belanja yang tidak jadi direalisasikan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang merupakan lembaga teknis daerah yang berfungsi membantu Walikota dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian. Pelaksanaan manajemen kepegawaian merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan penunjang daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menyangkut pengelolaan manajemen kepegawaian di daerah, belum ada acuan yang dijadikan dasar untuk menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan

kondisi itu maka pelaksanaan pelayanan manajemen kepegawaian di daerah mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang disusun berdasarkan urusan-urusan wajib yang diserahkan Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang. Sesuai dengan Lampiran XIII Perda Nomor 12 tahun 2008 dimaksud maka pelayanan manajemen kepegawaian antara lain meliputi perencanaan formasi, pengadaan, kenaikan pangkat, mutasi dan promosi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian, pembinaan disiplin, fasilitasi kartu identitas pegawai seperti : Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), Kartu Taspen, Kartu Suami / Isteri, pemutakhiran data PNS, serta proses pemberhentian dan pensiun PNS. Untuk melaksanakan manajemen kepegawaian tersebut, sebagian besar berpedoman kepada aturan yang berlaku, mengingat sebagian sistem manajemen kepegawaian secara nasional sama penerapannya.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa BKPSDM belum menyusun SPM di bidang kepegawaian, maka pelaksanaannya mempedomani Pasal 11 PP Nomor 38 Tahun 2008, karena untuk pengelolaan manajemen kepegawaian ini sudah ada prosedur yang diberlakukan secara nasional seperti kenaikan pangkat, pembinaan disiplin maupun promosi dan mutasi, maka standar pelayanannya mengacu kepada aturan terkait seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian maupun Keputusan Bersama Kementerian/Lembaga terkait.

Kinerja pelayanan pada BKPSDM secara umum sudah terlaksana dengan baik, sebagai contoh untuk proses kenaikan pangkat tahun 2017 dapat direalisasikan sebanyak 326 pegawai, dengan rincian kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2017 sebanyak 231 orang, dan periode 1 Oktober 2017 sebanyak 95 orang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS, maka dalam 1 tahun, ada 2 (dua) periode Kenaikan Pangkat yaitu bulan April dan bulan Oktober. Secara umum, Kenaikan Pangkat dan pensiun PNS yang menjadi kewenangan Walikota yaitu untuk PNS golongan I/b s/d III/d kinerja pelayanannya cukup baik, namun untuk golongan IV/a dan seterusnya yang menjadi kewenangan Gubernur atau Presiden, maka kinerja pelayanan sangat ditentukan oleh Gubernur Cq. BKD Provinsi serta Presiden (Sekretariat Kabinet). Namun untuk menyikapinya, BKPSDM mengirimkan berkas administrasi kepada Sekretariat Kabinet dan BKN Pusat lebih cepat, seperti untuk berkas

pensiun disampaikan minimal 7 bulan sebelum PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Pada hakikatnya, isu merupakan suatu gambaran wacana yang masih diperdebatkan dan belum ditangani dan diolah secara optimal ke dalam suatu agenda pada lembaga tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi yang bisa terjadi pada arah tujuan, cara, prinsip, lokasi, waktu dan kelompok - kelompok yang memperoleh keuntungan atau kerugian akibat dampak atau hasil pemecahan isu tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, tuntutan terhadap pelaksanaan manajemen SDM aparatur juga telah terjadi pergeseran. Saat ini, sebagian besar masyarakat menginginkan suatu bentuk pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas dari aparatur. Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas tersebut, tentu saja dipengaruhi oleh kualitas, kompetensi dan tingkat kesejahteraan aparatur tersebut. Namun yang paling penting untuk mewujudkan hal tersebut, adalah kemauan yang kuat dari semua pihak, untuk bersama-sama memperbaiki pelayanan.

Dengan demikian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam proses pelaksanaan manajemen kepegawaian, juga berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Isu penting yang berkaitan dengan BKPSDM adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya manajemen kepegawaian dalam peningkatan profesionalisme ASN
2. Pendayagunaan aparatur yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional belum sesuai dengan yang diharapkan
3. Kurangnya motivasi ASN untuk mengembangkan potensi dan kompetensi
4. Belum optimalnya pemanfaatan IT untuk manajemen kepegawian

Isu-isu penting diatas mengisyaratkan perlunya meletakkan peningkatan pembinaan dan pengembangan PNS menjadi program prioritas dalam menyiapkan kesiapan aparatur daerah dalam menghadapi perubahan di era reformasi birokrasi ini.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Merujuk pada analisa kebutuhan OPD tahun 2019, terdapat beberapa kegiatan yang diusulkan dalam rancangan awal RKPD. Diantaranya pembangunan gedung kantor, pengadaan perlengkapan kantor, pendidikan dan pelatihan tugas dan fungsi PNSD, pengembangan karir, seleksi penerimaan CPNS, diklat struktural, dll. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada Tabel.2.4 berikut ini.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu kebijakan nasional. Hal ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Dimana tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur dapat dipertanggung jawabkan, baik secara kualitas maupun biaya.

Untuk mendukung reformasi birokrasi secara nasional tersebut, maka BKPSDM tentu harus menyikapinya dengan positif serta mempersiapkan kegiatan yang dapat mendukung kebijakan nasional dimaksud. Untuk itu, rencana kerja yang ditetapkan setiap tahun, harus mampu menceminkan arah reformasi birokrasi, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan berpijak pada kebijakan nasional tentang reformasi birokrasi tersebut, maka diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM akan menghasilkan nilai-nilai yang positif, terutama dalam hal pelaksanaan manajemen kepegawaian. Sebab sasaran reformasi birokrasi akan sulit terwujud jika BKPSDM yang memiliki fungsi manajemen kepegawaian tidak menjalankan fungsinya tersebut dengan baik.

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi, Pemerintah telah mencanangkan beberapa program, seperti Netralitas PNS dan Peningkatan Profesionalitas PNS, Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik (e-government), Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri, Penganjangan Pakta Integritas, Percepatan Pemberantasan KKN, Optimalisasi Penggunaan SAPK dan Penyempurnaan Peraturan Disiplin PNS.

Sebagaimana arahan Menteri dan Wakil Menteri PAN-RB dalam berbagai kegiatannya menyebutkan bahwa Pemerintah mengagendakan pembaharuan paradigma PNS, yaitu meningkatkan kinerja, perampingan struktur organisasi dan penggantian jabatan struktural dengan fungsional. Disamping itu terdapat beberapa kebijakan lain yang perlu disikapi, terutama untuk meningkatkan kompetensi aparatur daerah dalam menyongsong era perubahan yang sudah dekat tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

a. Tujuan

Tujuan dan sasaran Renja BKPSDM pada intinya juga mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023. Selain itu Renja BKPSDM Tahun 2019 ini merupakan gambaran keadaan masa mendatang tentang kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Kota Padang Panjang yang dapat direalisasikan. Tujuan dari Rencana Kerja 2019 BKPSDM Kota Padang Panjang adalah :

”Meningkatnya Profesionalitas ASN Kota Padang Panjang”

b. Sasaran

Secara umum, sasaran adalah hasil dari proses atau kegiatan yang diinginkan oleh organisasi. Isu-isu penting terbaru yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pada BKPSDM adalah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Dimana terdapat beberapa peraturan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang mencapai BUP, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, dll. Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka BKPSDM harus mempelajari, menyikapi dan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari BKPSDM sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain isu-isu tersebut di atas, isu lain yang cukup penting terkait dengan pelaksanaan tugas BKPSDM adalah adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini BKN untuk lebih mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi kepegawaian. Untuk itu BKN merancang sistem pelayanan kepegawaian yaitu Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). SAPK ini terhubung langsung (Online) dengan BKN Pusat dan BKN Regional XII Pekanbaru, termasuk diantara pelayanan kenaikan pangkat. Untuk perbaikan dan percepatan pelayanan administrasi kepegawaian bagi seluruh aparatur Kota Padang Panjang, BKPSDM perlu memberikan perhatian lebih dalam pelaksanaan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) ini.

Isu penting yang terkait dengan sasaran Renja BKPSDM adalah dalam hal peningkatan kompetensi aparatur. Salah satu cara dalam peningkatan kompetensi aparatur adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Kondisi saat ini, dengan belum adanya gedung diklat yang representatif, maka pelayanan diklat oleh BKPSDM, setiap tahunnya belum optimal. Untuk itu dalam Renja BKPSDM tahun 2019 ini, juga diusulkan lanjutan pembangunan gedung kantor sekaligus ruang diklat yang representatif. Diharapkan dengan adanya gedung diklat yang representatif, sasaran yang ingin dicapai oleh BKPSDM dapat diwujudkan.

Isu penting lainnya adalah peningkatan penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensinya, peningkatan kualitas manajemen informasi dan data kepegawaian serta peningkatan disiplin ASN.

3.3 Program dan Kegiatan

Renja BKPSDM tahun 2019, sesuai dengan fungsi, isu strategis, maupun kebijakan nasional ada sebanyak 8 program dan 36 kegiatan yang merupakan Prioritas I yang terdiri dari :

PRIORITAS I

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 10 kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 5 kegiatan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : 1 kegiatan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 3 kegiatan
5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan : 4 kegiatan
6. Program Pendidikan Kedinasan : 2 kegiatan
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : 9 kegiatan
8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah : 2 kegiatan

Dengan adanya program dan kegiatan yang direncanakan tersebut, diharapkan mampu mewujudkan aparatur Kota Padang Panjang berkualitas dan profesional, sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan. Untuk itu, maka program dan kegiatan yang direncanakan tersebut dapat diakomodir oleh pihak terkait dan dapat direalisasikan. Program dan kegiatan BKPSDM tahun 2019 sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.4.

BAB IV

PENUTUP

Berikut ini ada beberapa poin penting yang terkait dengan isu-isu strategis nasional, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BKPSDM, sehingga dapat dijadikan prioritas kegiatan BKPSDM tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Adanya Rencana Strategis Nasional 2010-2025 tentang reformasi birokrasi, di mana bagian dari reformasi birokrasi tersebut adalah mewujudkan aparatur yang profesional dalam pelayanan serta memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai. Dengan demikian, kegiatan BKPSDM yang mendukung reformasi birokrasi tersebut, dapat dijadikan prioritas kegiatan tahun 2019, sehingga pembiayaannya dapat ditampung pada anggaran tahun 2019.
2. Implementasi Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang diluncurkan oleh BKN dan harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini BKPSDM. SAPK ini adalah sistem pelayanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi yang Online antara BKPSDM dengan BKN Pusat dan BKN Regional. Dengan demikian, kegiatan yang terkait dengan SAPK ini tetap ditampung pada kegiatan BKPSDM tahun 2019.
3. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, dimana Peraturan Pemerintah ini menggantikan beberapa peraturan sebelumnya terkait manajemen kepegawaian seperti formasi, pengangkatan dan pemberhentian PNS, jabatan fungsional tertentu, pengadaan CPNS, dll. Untuk itu, Renja BKPSDM tahun 2019 yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini kiranya ditampung pada kegiatan BKPSDM tahun 2019.
4. Diklat merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk mewujudkan aparatur yang berkualitas, dimana hal ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Dengan demikian, kegiatan BKPSDM yang terkait dengan Diklat Struktural, Teknis Fungsional, Tugas dan Izin Belajar, serta sarana dan prasarana seperti lanjutan pembangunan gedung kantor dan ruang diklat, kiranya dapat ditampung dan dialokasikan dananya pada kegiatan BKPSDM tahun 2019.
5. Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 terkait implementasi pembentukan OPD baru dan pengisian jabatan struktural..

Dari uraian tersebut di atas pada dasarnya kegiatan BKPSDM yang diajukan pada Renja tahun 2019, merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan aparatur yang profesional. Walaupun dana APBD Kota Padang Panjang terbatas, namun usulan Renja BKPSDM tahun 2019, dapat kiranya dijadikan prioritas untuk disediakan

dananya pada APBD Kota Padang Panjang tahun 2019. Selain itu, kegiatan yang juga menyangkut dengan peningkatan kesejahteraan aparatur Kota Padang Panjang juga dapat menjadi masukan serta dapat disediakan dananya pada kegiatan BKPSDM tahun 2019. Hal ini didasarkan bahwa, untuk menciptakan aparatur yang profesional, maka harus didukung oleh tingkat kesejahteraan yang memadai sesuai dengan kinerja dan beban tugas.

Dengan demikian usulan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tahun 2019 ini, keberhasilannya juga ditentukan dan butuh dukungan dari seluruh stakeholder yang berkaitan dengan perwujudan aparatur yang profesional, sebagaimana cita-cita reformasi birokrasi yang digariskan pada Rencana Strategis Nasional tahun 2010-2025.

Padang Panjang, Januari 2018
**Pt. KEPALA BKPSDM
KOTA PADANG PANJANG**


PENDRA PUTRA, S.ST, MT
Pejabat Tk. I / NIP. 19700107 199003 1 003

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kota Padang Panjang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14
					N		I		H		I		L		

Padang Panjang, Maret 2018
PIL. KEPALA BKPSDM
KOTA PADANG PANJANG

HENDRA PUTRA, S.ST, MT
 Pejabat Tk. // NIP. 19700107 199003 1 003

TABEL 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Padang Panjang

Nama OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

Padang Panjang, Maret 2018

Pt. KEPALA BKPSDM
KOTA PADANG PANJANG

PENDRA PUTRA, S.ST, MT

Pejabat: Tk. I // NIP. 19700107 199003 1 003

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KOTA PADANG PANJANG**

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
					7.190.956					#####	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.071.059	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				#####	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Pasar Usang	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	3 jenis	4.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Pasar Usang	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	3 jenis	4.200,000	600 materai
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Pasar Usang	Jumlah tagihan rekening yang dibayar	36 tagihan	35.160	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Pasar Usang	Jumlah tagihan rekening yang dibayar	36 tagihan	35.160,000	12 tagihan listrik, 12 tagihan telepon dan 12 tagihan air
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kel. Pasar Usang	Jumlah kendaraan dinas / operasioanl yang dipelihara	17 unit	249.029	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kel. Pasar Usang	Jumlah kendaraan dinas / operasioanl yang dipelihara	17 unit	249.028,500	4 unit roda empat dan 13 unit roda dua
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kel. Pasar Usang	Luas gedung kantor yang dibersihkan dan THL kebersihan yang tersedia	4 orang	128.985	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kel. Pasar Usang	Luas gedung kantor yang dibersihkan dan THL kebersihan yang tersedia	4 orang	128.985,000	2 orang CS dan 2 orang penjaga malam
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kel. Pasar Usang	Jumlah jenis ATK yang disediakan	100 jenis	37.540	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kel. Pasar Usang	Jumlah jenis ATK yang disediakan	100 jenis	37.540,000	100 jenis
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Pasar Usang	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan dalam satu tahun	10 jenis	61.146	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Pasar Usang	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan dalam satu tahun	10 jenis	61.145,500	Belanja cetak disposisi, spanduk, map, amplop,dll
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Pasar Usang	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dalam satu tahun	15 jenis	6.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Pasar Usang	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dalam satu tahun	15 jenis	6.000,000	Bola lampu, battery kering,dll
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kel. Pasar Usang	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	600 paket	10.500	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kel. Pasar Usang	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	600 paket	10.500,000	300 makan dan 300 snack
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kel. Pasar Usang	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	350 kali	500.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kel. Pasar Usang	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	350 kali	500.000,000	350 kali perjalanan dinas
10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kel. Pasar Usang	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan	1 orang	38.500	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kel. Pasar Usang	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan	1 orang	38.500,000	1 orang

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3.120.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				#####	
11	Pembangunan Gedung Kantor	Kel. Koto Panjang	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	3.000.000	Pembangunan Gedung Kantor	Kel. Koto Panjang	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	#####	Lanjutan pembangunan gedung kantor
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kel. Pasar Usang	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang diadakan	9 unit	76.900	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kel. Pasar Usang	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang diadakan	9 unit	76.900,000	Laptop 4 unit, printer all in one 2 unit, UPS besar 3 unit
13	Pengadaan Mebeleur	Kel. Pasar Usang	Jumlah pengadaan mebeleur kantor	1 jenis	3.100	Pengadaan Mebeleur	Kel. Pasar Usang	Jumlah pengadaan mebeleur kantor	1 jenis	3.100,000	Lemari kayu 2 unit
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kel. Pasar Usang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	15.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kel. Pasar Usang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	15.000,000	1 unit
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kel. Pasar Usang	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	18 jenis	25.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kel. Pasar Usang	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	18 jenis	25.000,000	Komputer PC 15 unit, Laptop 7 unit, Notebook 2 unit,dll
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				49.600	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				49.600,000	
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Kel. Pasar Usang	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	62 Stel	49.600	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Kel. Pasar Usang	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	62 Stel	49.600,000	62 Stel
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase PNS yang memperoleh peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, bimtek dan diklat		831.825	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase PNS yang memperoleh peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, bimtek dan diklat		831.825,000	
17	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Padang Panjang	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	90 orang	35.675	Sosialisasi Perka BKN Nomor 3 Tahun 2016	Padang Panjang	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	90 orang	35.675,000	Sosialisasi Perka BKN No. 3 Th 2016
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang Panjang	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti bimtek	5 orang	50.500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang Panjang	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti bimtek	5 orang	50.500,000	5 orang
19	Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Padang Panjang	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tugas	120 orang	745.650	Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Padang Panjang	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tugas	120 orang	745.650,000	4 buah diklat
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		Persentase penyelesaian penyusunan laporan capaian kinerja keuangan		852	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		Persentase penyelesaian penyusunan laporan capaian kinerja keuangan		852,000	
20	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Pasar Usang	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang disusun	15 laporan	255	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Pasar Usang	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang disusun	15 laporan	255,000	Lakip, LKPJ, LPPD, Laporan bulanan
21	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kel. Pasar Usang	Jumlah laporan Keuangan Semesteran	2 laporan	255	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kel. Pasar Usang	Jumlah laporan Keuangan Semesteran	2 laporan	255,000	2 laporan
22	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kel. Pasar Usang	Jumlah laporan Prognosis realisasi anggaran	1 laporan	152	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kel. Pasar Usang	Jumlah laporan Prognosis realisasi anggaran	1 laporan	152,000	1 laporan
23	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kel. Pasar Usang	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	190	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kel. Pasar Usang	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	190,000	1 laporan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
VI	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Persentase PNS yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir		866.998	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Persentase PNS yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir		866.997,500	
24	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Kel. Pasar Usang	Jumlah PNS yang dikembangkan karirnya melalui Jabatan Fungsional, mutasi, rotasi, dan promosi	250 orang	10.100	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Kel. Pasar Usang	Jumlah PNS yang dikembangkan karirnya melalui Jabatan Fungsional, mutasi, rotasi, dan promosi	250 orang	10.100,000	250 orang
25	Seleksi Penerimaan CPNS	Padang Panjang	Jumlah CPNS yang diterima	150 orang	361.565	Seleksi Penerimaan CPNS	Padang Panjang	Jumlah CPNS yang diterima	150 orang	361.565,000	150 orang
26	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Kel. Pasar Usang	Jumlah PNS yang naik pangkat dan yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	400 orang	37.000	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Kel. Pasar Usang	Jumlah PNS yang naik pangkat dan yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	400 orang	37.000,000	350 orang naik pangkat, 50 orang ikut ujian Penyesuaian Ijazah
27	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Kel. Pasar Usang	Jumlah kasus pelanggaran disiplin sedang dan / berat PNS yang diproses dan ditindaklanjuti	8 kasus	2.750	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Kel. Pasar Usang	Jumlah kasus pelanggaran disiplin sedang dan / berat PNS yang diproses dan ditindaklanjuti	8 kasus	2.750,000	8 kasus
28	Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas	Kel. Pasar Usang	Jumlah PNS yang diberikan bantuan tugas belajar dan yang diberikan izin belajar	40 orang	165.113	Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas	Kel. Pasar Usang	Jumlah PNS yang diberikan bantuan tugas belajar dan yang diberikan izin belajar	40 orang	165.112,500	Tubel : 10 orang, Ibel : 30 orang
29	Kegiatan Proses Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Proses Penerbitan KARIS, KARSU, KARTU dan KARPEG	Kel. Pasar Usang	Jumlah PNS yang menerima piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya	75 orang	3.240	Kegiatan Proses Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Proses Penerbitan KARIS, KARSU, KARTU dan KARPEG	Kel. Pasar Usang	Jumlah PNS yang menerima piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya	75 orang	3.240,000	75 piagam satya lencana
30	Ujian Kompetensi Jabatan Bagi Pejabat Struktural	Padang Panjang	Jumlah PNS yang mengikuti ujian kompetensi	105 orang	265.750	Ujian Kompetensi Jabatan Bagi Pejabat Struktural	Padang Panjang	Jumlah PNS yang mengikuti ujian kompetensi	105 orang	265.750,000	105 orang
31	Ujian Kompetensi PNS yang Akan Pindah Ke Pemerintah Kota Padang Panjang	Padang Panjang	Jumlah Pegawai yang mengikuti ujian kompetensi pindah	30 orang	12.975	Ujian Kompetensi PNS yang Akan Pindah Ke Pemerintah Kota Padang Panjang	Padang Panjang	Jumlah Pegawai yang mengikuti ujian kompetensi pindah	30 orang	12.975,000	30 orang
32	Sistem Penilaian Kinerja ASN Kota Padang Panjang	Padang Panjang	Jumlah OPD yang dimonitoring dan evaluasi	12 OPD	8.505	Sistem Penilaian Kinerja ASN Kota Padang Panjang	Padang Panjang	Jumlah OPD yang dimonitoring dan evaluasi	12 OPD	8.505,000	12 OPD
VII	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah		Persentase dokumen PNS yang tertata		39.873	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah		Persentase dokumen PNS yang tertata		39.872,500	
33	Penataan dan Penyelamatan Dokumen dan Arsip PNS	Kel. Pasar Usang	Jumlah dokumen pegawai unit kerja yang ditata	400 File	28.413	Penataan dan Penyelamatan Dokumen dan Arsip PNS	Kel. Pasar Usang	Jumlah dokumen pegawai unit kerja yang ditata	400 File	28.412,500	400 File
34	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Kel. Pasar Usang	Jumlah buku data pegawai yang up to date dan valid dalam bentuk buku	60 buku	11.460	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Kel. Pasar Usang	Jumlah buku data pegawai yang up to date dan valid dalam bentuk buku	60 buku	11.460,000	60 buku
VIII	Program Pendidikan Kedinasan		Persentase PNS yang mengikuti diklat		1.210.750	Program Pendidikan Kedinasan		Persentase PNS yang mengikuti diklat		#####	
35	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Padang Panjang	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM I, II, III, IV dan diklat pra jabatan	16 orang	649.000	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Padang Panjang	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM I, II, III, IV dan diklat pra jabatan	16 orang	649.000,000	16 orang
36	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Padang Panjang	Jumlah pengiriman peserta diklat peningkatan keterampilan dan profesionalisme	40 orang	561.750	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Padang Panjang	Jumlah pengiriman peserta diklat peningkatan keterampilan dan profesionalisme	40 orang	561.750,000	40 orang
					7.190.956					7.190.956	

Padang Panjang, Maret 2018

**PI. KEPALA BKPSDM
KOTA PADANG PANJANG**

PENDRA PUTRA, S.ST, MT
Peuati: Tk. / NIP. 19700107 199003 1 003

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA PADANG PANJANG**

**NAMA OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PRIORITAS PERTAMA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 04	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian				7.190.956.000				12.307.967.550
3 04 01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM				7.190.956.000				12.307.967.550
3 04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.071.059.000				1.507.735.550
3 04 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	Kel. Pasar Usang	3 jenis	4.200.000	APBD	600 materai	3 jenis	4.200.000
3 04 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayar	Kel. Pasar Usang	36 tagihan	35.160.000	APBD	12 tagihan listrik, 12 tagihan telepon dan 12 tagihan air	36 tagihan	38.676.000
3 04 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasioanl yang dipelihara	Kel. Pasar Usang	17 unit	249.028.500	APBD	4 unit roda empat dan 13 unit roda dua	17 unit	273.931.350
3 04 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas gedung kantor yang dibersihkan dan THL kebersihan yang tersedia	Kel. Pasar Usang	4 orang	128.985.000	APBD	2 orang CS dan 2 orang penjaga malam	4 orang	141.883.500
3 04 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Kel. Pasar Usang	100 jenis	37.540.000	APBD	100 jenis	100 jenis	41.294.000
3 04 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan dalam satu tahun	Kel. Pasar Usang	10 jenis	61.145.500	APBD	Belanja cetak disposisi, spanduk, map, amplop,dll	10 jenis	67.250.700
3 04 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dalam satu tahun	Kel. Pasar Usang	15 jenis	6.000.000	APBD	Bola lampu, battery kering,dll	15 jenis	6.600.000
3 04 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	Kel. Pasar Usang	600 paket	10.500.000	APBD	300 makan dan 300 snack	600 paket	11.550.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 04 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	Kel. Pasar Usang	350 kali	500.000.000	APBD	350 kali perjalanan dinas	500 kali	880.000.000
3 04 01 01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan	Kel. Pasar Usang	1 orang	38.500.000	APBD	1 orang	1 orang	42.350.000
3 04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3.120.000.000	APBD			7.561.500.000
3 04 01 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kel. Koto Panjang	1 unit	3.000.000.000	APBD	Lanjutan pembangunan gedung kantor	1 unit	7.000.000.000
3 04 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang diadakan	Kel. Pasar Usang	9 unit	76.900.000	APBD	Laptop 4 unit, printer all in one 2 unit, UPS besar 3 unit	1 set gordena jendela, 2 set sound system, 4 unit infocus dan 2 unit printer	370.000.000
3 04 01 02 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur kantor	Kel. Pasar Usang	1 jenis	3.100.000	APBD	Lemari kayu 2 unit	120 unit kursi rapat, 3 set meja rapat, 3 set kursi tunggu, 1 set meja resepsionis, lemari kayu 4 unit	150.000.000
3 04 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kel. Pasar Usang	1 unit	15.000.000	APBD	1 unit	1 unit	16.500.000
3 04 01 02 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	Kel. Pasar Usang	18 jenis	25.000.000	APBD	Komputer PC 15 unit, Laptop 7 unit, Notebook 2 unit,dll	18 jenis	25.000.000
3 04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				49.600.000				80.000.000
3 04 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kel. Pasar Usang	62 Stel	49.600.000	APBD	62 Stel	100 Stel	80.000.000
3 04 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, bimtek dan diklat			831.825.000				836.000.000
3 04 01 05 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Padang Panjang	90 orang	35.675.000	APBD	Sosialisasi Perka BKN No. 3 Th 2016		
3 04 01 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti bimtek	Padang Panjang	5 orang	50.500.000	APBD	5 orang	5 orang	55.550.000
3 04 01 05 07	Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tugas	Padang Panjang	120 orang	745.650.000	APBD	4 buah diklat	120 orang	780.450.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 04 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase penyelesaian penyusunan laporan capaian kinerja keuangan			852.000				852.000
3 04 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang disusun	Kel. Pasar Usang	15 laporan	255.000	APBD	Lakip, LKPJ, LPPD, Laporan bulanan	15 laporan	255.000
3 04 01 06 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan Keuangan Semesteran	Kel. Pasar Usang	2 laporan	255.000	APBD	2 laporan	2 laporan	255.000
3 04 01 06 03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis realisasi anggaran	Kel. Pasar Usang	1 laporan	152.000	APBD	1 laporan	1 laporan	152.000
3 04 01 06 04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	Kel. Pasar Usang	1 laporan	190.000	APBD	1 laporan	1 laporan	190.000
3 04 01 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir			866.997.500				946.195.250
3 04 01 30 01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah PNS yang dikembangkan karirnya melalui Jabatan Fungsional, mutasi, rotasi, dan promosi	Kel. Pasar Usang	250 orang	10.100.000	APBD	250 orang	250 orang	11.800.000
3 04 01 30 02	Seleksi Penerimaan CPNS	Jumlah CPNS yang diterima	Padang Panjang	150 orang	361.565.000	APBD	150 orang	200 orang	397.721.500
3 04 01 30 04	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah PNS yang naik pangkat dan yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Kel. Pasar Usang	400 orang	37.000.000	APBD	350 orang naik pangkat, 50 orang ikut ujian Penyesuaian Ijazah	350 orang naik pangkat, 50 orang ikut ujian Penyesuaian Ijazah	40.700.000
3 04 01 30 09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin sedang dan / berat PNS yang diproses dan ditindaklanjuti	Kel. Pasar Usang	8 kasus	2.750.000	APBD	8 kasus	8 kasus	3.025.000
3 04 01 30 11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang diberikan bantuan tugas belajar dan yang diberikan izin belajar	Kel. Pasar Usang	40 orang	165.112.500	APBD	Tubel : 10 orang, lbel : 30 orang	Tubel : 10 orang, lbel : 30 orang	181.623.750
3 04 01 30 38	Kegiatan Proses Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Proses Penerbitan KARIS, KARSU, KARTU dan KARPEG	Jumlah PNS yang menerima piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Kel. Pasar Usang	75 orang	3.240.000	APBD	75 piagam satya lencana	100 piagam satya lencana	4.000.000
3 04 01 30 40	Ujian Kompetensi Jabatan Bagi Pejabat Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti ujian kompetensi	Padang Panjang	105 orang	265.750.000	APBD	105 orang	105 orang	292.325.000
3 04 01 30 42	Ujian Kompetensi PNS yang Akan Pindah Ke Pemerintah Kota Padang Panjang	Jumlah Pegawai yang mengikuti ujian kompetensi pindah	Padang Panjang	30 orang	12.975.000	APBD	30 orang	30 orang	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 04 01 30 43	Sistem Penilaian Kinerja ASN Kota Padang Panjang	Jumlah OPD yang dimonitoring dan evaluasi	Padang Panjang	12 OPD	8.505.000	APBD	12 OPD	12 OPD	9.355.500
3 04 01 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Persentase dokumen PNS yang tertata			39.872.500				43.859.750
3 04 01 16 02	Penataan dan Penyelamatan Dokumen dan Arsip PNS	Jumlah dokumen pegawai unit kerja yang ditata	Kel. Pasar Usang	400 File	28.412.500	APBD	400 File	400 File	31.253.750
3 04 01 16 27	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah buku data pegawai yang up to date dan valid dalam bentuk buku	Kel. Pasar Usang	60 buku	11.460.000	APBD	60 buku	60 buku	12.606.000
3 04 01 34	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang mengikuti diklat			1.210.750.000				1.331.825.000
3 04 01 34 02	Pendidikan Penjurusan Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM I, II, III, IV dan diklat pra jabatan	Padang Panjang	16 orang	649.000.000	APBD	16 orang	16 orang	713.900.000
3 04 01 34 03	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah pengiriman peserta diklat peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Padang Panjang	40 orang	561.750.000	APBD	40 orang	40 orang	617.925.000
	JUMLAH				7.190.956.000				12.307.967.550

Padang Panjang, Maret 2018

**Pt. KEPALA BKPSDM
KOTA PADANG PANJANG**

PENDRA PUTRA, S.Si, MT
Pejabat: Tk. I / NIP. 19700107 199003 1 003

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Pencapaian Renstra 2014 - 2018
Kota Padang Panjang

Nama OPD : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2016 (Tahun n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
1 20 06	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		9628	6180	1712	1650	96%	1704	9534	99%	
1 20 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		106	66	20	20	100%	13	99	93%	
1 20 06 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	5	3	1	1	100%	1	5	100%	
1 20 06 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening air, listrik, telepon dan internet	5	3	1	1	100%	1	5	100%	
1 20 06 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	5	3	1	1	100%	1	5	100%	
1 20 06 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	43	27	8	8	100%	0	35	81%	
1 20 06 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	14	8	3	3	100%	4	15	107%	
1 20 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5	3	1	1	100%	1	5	100%	
1 20 06 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5	3	1	1	100%	1	5	100%	
1 20 06 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	5	3	1	1	100%	1	5	100%	
1 20 06 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	2	0	0	0%	0	2	100%	
1 20 06 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5	3	1	1	100%	1	5	100%	
1 20 06 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya rapat konsultasi dalam dan luar daerah	5	3	1	1	100%	1	5	100%	
1 20 06 01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya honorarium bagi pegawai harian	7	5	1	1	100%	1	7	100%	
1 20 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	26	18	5	4	75%	4	25,7703	99%	
1 20 06 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	Persentase pembangunan gedung kantor	100%	0	100%	77,03%	77,03%	100%	100%	100,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2016 (Tahun n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1 20 06 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	7	7	0	0	0%	0	7	100%	
1 20 06 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	5	3	1	1	100%	1	5	100%	
1 20 06 02 10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	1	1	0	0	0%	0	1	100%	
1 20 06 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dilengkapi dengan biopori	5	3	1	1	100%	1	5	100%	
1 20 06 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya alat-alat kantor	5	3	1	1	100%	1	5	100%	
1 20 06 02 42	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab taman BKD	1	1	0	0	0%	0	1	100%	
1 20 06 02 83	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Tersedianya sertifikat tanah pemerintah daerah	1	0	1	0	0%	0	0	0%	
1 20 06 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	424	292	54	54	0%	0	346	82%	
1 20 06 03 77	Pengadaan Mesin Absensi Online	Tersedianya mesin absensi di masing-masing OPD	54	0	54	54	100%	0	54	100%	
1 20 06 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS	370	292	0	0	0%	0	292	79%	
1 20 06 04	Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS		115	0	0	0	0%	0	0	0%	
1 20 06 04 04	Proses Pengelolaan Pengurusan, Pemberhentian dan Pensiun PNS	Ditetapkannya keputusan bagi PNS yang memasuki pensiun/pensiun dini	115	0	0	0	0%	0	0	0%	
1 20 06 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	356	328	36	43	119%	6	377	106%	
1 20 06 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti bimtek	45	33	5	5	100%	5	43	96%	
1 20 06 05 06	Sosialisasi PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990	Terlaksananya sosialisasi PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990	30	0	30	37	123%	0	37	123%	
1 20 06 05 06	Sosialisasi Pengisian Blanko LHKPN	Terlaksananya sosialisasi pengisian blanko LHKPN	140	158	0	0	0%	0	158	113%	
1 20 06 05 07	Penyelenggaraan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Jumlah diklat teknis yang dilaksanakan	20	18	1	1	100%	1	20	100%	
1 20 06 05 08	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	jumlah diklat fungsional yang dilaksanakan	6	4	0	0	0%	0	4	67%	
1 20 06 05 10	Bimbingan Teknis Administrasi Dokumen Kepegawaian	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti bimtek	115	115	0	0	0%	0	115	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2016 (Tahun n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1 20 06 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya penilaian evaluasi kinerja SK	95	57	19	19	100%	19	95	100%	
1 20 06 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja (Lakip, LKPI, LPPD, Laporan bulanan)	75	45	15	15	100%	15	75	100%	
1 20 06 06 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan Keuangan Semesteran	10	6	2	2	100%	2	10	100%	
1 20 06 06 03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan Prognosis realisasi anggaran	5	3	1	1	100%	1	5	100%	
1 20 06 06 04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun	5	3	1	1	100%	1	5	100%	
1 20 06 29	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya persentase penerapan sistem promosi dan mutasi aparatur yang berbasis kompetensi (the right man on the job)	5516	3561	1160	1066	92%	1122	5749	104%	
1 20 06 29 04	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Terlaksananya proses pembinaan karir PNS seperti mutasi, rotasi, promosi dan ujian dinas	1000	921	250	251	100%	125	1297	130%	
1 20 06 29 05	Seleksi Penerimaan CPNS	Jumlah CPNS yang diterima	585	0	105	0	0%	198	198	34%	
1 20 06 29 06	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah Surat keputusan kenaikan pangkat, gelar dan masa kerja yang diterbitkan	1447	1205	350	326	93%	370	1901	131%	
1 20 06 29 08	Proses Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang berhak menerima piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya	525	390	50	121	242%	97	608	116%	
		Jumlah Karis, Karsu dan Taspen yang diproses	904	398	140	112	80%	0	510	56%	
1 20 06 29 08	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah sidang kasus pelanggaran disiplin PNS	235	66	45	23	51%	30	119	51%	
1 20 06 29 09	Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang dikirim untuk tugas belajar, kerja sama pendidikan dan izin belajar	256	151	32	36	113%	42	229	89%	
1 20 06 29	Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabus, Modul, Pedoman Diklat)	Jumlah buku analisis diklat	40	40	0	0	0%	0	40	100%	
1 20 06 29 20	Pengembangan PNS melalui Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan karir fungsional	270	156	150	161	107%	125	442	164%	
1 20 06 29 40	Ujian Kompetensi Jabatan Bagi Pejabat Struktural	Terseleksinya pejabat struktural	143	209	37	35	95%	105	349	244%	
1 20 06 29 42	Ujian Kompetensi PNS yang Akan Pindah ke Pemerintah Kota Padang Panjang	Jumlah Pegawai yang mengikuti ujian kompetensi pindah	110	25	0	0	0%	30	55	50%	
1 20 06 29 43	Sistem Penilaian Kinerja ASN Kota Padang Panjang	Terlaksananya pembinaan terhadap PNS	1	0	1	1	100%	0	1	100%	
1 20 06 63	Program Pendidikan Kedinasan		390	188	66	64	97%	80	332	85%	
1 20 06 63 01	Pendidikan Penjurangan Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM I, II, III, IV dan diklat pra jabatan	183	138	9	7	78%	35	180	98%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2016 (Tahun n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1 20 06 63 01	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Terlaksananya pengiriman peserta diklat peningkatan keterampilan dan profesionalisme	207	50	57	57	100%	45	152	73%	
1 20 06 66	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Terwujudnya pengelolaan arsip kepegawaian dan data base berbasis teknologi informasi	2600	1670	352	380	108%	460	2510	97%	
1 20 06 66 01	Penataan dan Penyelamatan Dokumen dan Arsip PNS	Jumlah dokumen pegawai unit kerja yang ditata	2400	1500	300	328	109%	400	2228	93%	
1 20 06 29 07	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah buku data pegawai yang up to date dan valid dalam bentuk buku	200	170	52	52	100%	60	282	141%	
JUMLAH			9628	6180	1712	1650	96%	1704	9534	99%	

Padang Panjang, Maret 2018
**PIL. KEPALA BKPSDM
KOTA PADANG PANJANG**

PENDRA PUTRA, S.ST, MT
Pewat: Tk. / NIP. 19700107 199003 1 003